

**PENGGUNAAN NARASI “KEMBALI KE TANAH LELUHUR” ZIONISME
REVISIONIS OLEH BENJAMIN NETANYAHU DALAM KLAIM ATAS
YERUSALEM DAN TEPI BARAT (2009- JULI 2018)**

TESIS



Oleh:

Yudi Prawira

2015851010

Pembimbing:

Dr. I Nyoman Sudira

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2018**



HALAMAN PENGESAHAN

**PENGUNAAN NARASI “KEMBALI KE TANAH LELUHUR” ZIONISME
REVISIONIS OLEH BENJAMIN NETANYAHU DALAM KLAIM ATAS
YERUSALEM DAN TEPI BARAT (2009- JULI 2018)**



Oleh;

Yudi Prawira

2015851010

**Disetujui untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
07 Agustus 2018**

Pembimbing:

Dr. Nyoman Sudira

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2018**



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Yudi Prawira
NPM : 2015851010
Program Studi : Magister Ilmu Sosial (Konsentrasi: Hubungan Internasional)
Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

Penggunaan Narasi “Kembali ke Tanah Leluhur” Zionisme Revisionis oleh Benjamin Netanyahu dalam Klaim Atas Yerusalem dan Tepi Barat (2009- Juli 2018)

adalah benar-benar karya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam kemasyarakatan keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 07 Agustus 2018



Yudi Prawira

**THE USING OF “BACK TO ANCESTRAL HOMELAND”
REVISIONIST ZIONISM NARRATIVE BY BENJAMIN NETANYAHU
ON CLAIMING YERUSALEM AND THE WEST BANK (2009-JULY
2018)**

Yudi Prawira

ABSTRACT

Revisionist Zionism narrative constructs Netanyahu’s policy in Jerusalem and the West Bank. The use of narrative in conflct is important to build world view either internally or externally to justify their ideological goal. This thesis uses Constructivism framework to understand how Netanyahu’s worldview constructed by that narrative and he replicates his world view by using speech act. This thesis uses qualitative interpretive method which focused on how to undertand narrative. The objective of this research is to understand Netanyahu’s position about Jerusalem and West Bank according to Revisionist Zionism ideology. I conclude that Netanyahu’s narrative and policy are shaped by Revisionist Zionism and at the same time he reproduces it at his narrative on claiming Jerusalem and the West Bank as we can see through his speeches.

Key word: Constructivism, narrative, Zionism, Netanyahu.

PENGGUNAAN NARASI “KEMBALI KE TANAH LELUHUR” ZIONISME REVISIONIS OLEH BENJAMIN NETANYAHU DALAM KLAIM ATAS YERUSALEM DAN TEPI BARAT (2009- JULI 2018)

Yudi Prawira

ABSTRAK

Narasi Zionisme Revisionis membentuk kebijakan pemerintahan Netanyahu dalam permasalahan Yerusalem dan Tepi Barat. Penggunaan narasi di dalam konflik itu penting dalam membangun pandangan dunia baik internal maupun eksternal yang bermanfaat bagi perjuangan ideologis Israel. Tesis ini menggunakan kerangka Konstruktivisme di dalam memahami bagaimana Netanyahu dibentuk oleh narasi itu dan mereplikasi pandangan dunianya melalui penggunaan narasi pula. Metode penelitian kualitatif interpretif yang fokus pada penggunaan narasi akan dipergunakan dalam mempelajarinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami posisi Netanyahu menyangkut Yerusalem dan Tepi Barat dalam kerangka Zionisme karena Netanyahu secara konsisten berjalan di dalam koridor ideologis ini. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa Netanyahu dibentuk dan mereproduksi kembali Narasi Zionisme Revisionis yang dapat dipelajari melalui pidato-pidatonya yang tidak menunjukkan kompromi menyangkut kepemilikan Yerusalem dan Tepi Barat.

Kata Kunci: Konstruktivisme, Narasi, Zionisme, Netanyahu

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Mama dan Papa yang telah membiayai studi magister ini serta doa yang selalu mereka dipanjatkan. Kesabaran dan dukungan yang diberikan selama proses pendidikan ini tidak dapat digantikan oleh apapun. Terima kasih juga kepada adik-adik saya Danil Prasetya dan Dinda Fitria yang selalu memberikan semangat selama proses ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada mbak Dyah Ayunda yang selalu bersedia untuk membantu dengan masukan, membaca tulisan awal maupun proses pengeditan. Terima kasih juga dengan mas Iyan Septiana yang bersedia membaca, membantu dengan masukan dan kritikan yang terkadang keras selama penyusunan tesis ini. Bantuan kedua orang itu sangat berarti karena penulis banyak melakukan kesalahan selama proses penyusunan tesis ini.

Terima kasih saya sampaikan juga kepada mas I Nyoman Sudira yang telah bersedia untuk menjadi pembimbing tesis ini. Bantuan teknis maupun masukan serta bersedianya beliau dalam menyempatkan diri untuk membimbing di tengah kesibukan sangat penulis hargai. Terima kasih juga kepada penguji, mas Yulius Purwadi Hermawan dan mas P.Y. Nur Indro yang telah memberikan banyak masukan dalam proses perbaikan Tesis dan seluruh dosen yang telah membimbing selama masa perkuliahan.

Penulis memohon maaf jika terdapat ketidakkonsistenan maupun kesalahan dalam proses penulisan tesis ini. Penulis berharap agar tesis ini bermanfaat baik bagi penulis maupun generasi berikutnya penstudi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih dan selamat membaca.

Bandung, 30 Juli 2018

Yudi Prawira

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
ABSTRACT	III
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan	7
1.4 Tinjauan Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	23
1.7 Sistematika Pembahasan	30
BAB II <u>ZIONISME REVISIONIS DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NETANYAHU DI ISRAEL</u>	33
2.1 Theodore Herzl dan Zionisme Awal	37
2.2 Jabotinsky dan Kemunculan Zionisme Revisionis	46
2.3 Ideologi Zionisme Revisionis Sebagai Inspirasi Partai Likud	53
2.4 Kebijakan Pemerintahan Netanyahu di Tepi Barat dan Yerusalem	56
2.5 Kebijakan Netanyahu dalam Mendorong Hukum Dasar Israel Sebagai Negara Yahudi	68

BAB III	PENGGUNAAN NARASI ZIONISME DALAM PERSELISIHAN STATUS YERUSALEM DAN TEPI BARAT	76
3.1	Ideologi Herzl dan Jabotinsky dalam Narasi yang Dipergunakan Benjamin Netanyahu.....	80
3.2	Narasi Zionis di Dalam Pidato Netanyahu Mengenai Yerusalem.....	92
3.3	Narasi Zionis di dalam Pidato Netanyahu Mengenai Tepi Barat	108
BAB IV	KESIMPULAN	124
	DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu identitas di Timur Tengah merupakan fenomena yang penting untuk dikaji. Beragamnya identitas berdasarkan etnis, agama, ideologi maupun kombinasi dari semua unsur tersebut masih menjadi isu di kawasan itu. Berbagai masalah berdasarkan unsur identitas di Timur Tengah menyumbang rumitnya konflik di kawasan ini, dimana pusat dari pusran konflik berada di antara Israel dan Palestina. Isu identitas yang dibentuk oleh ideologi juga menjadi faktor pendorong dari ketegangan di antara kedua komunitas tersebut, termasuk mengenai kepemilikan atas Yerusalem dan Tepi Barat.¹ Proses perdamaian sempat mencapai kemajuan pada tahun 1993, tetapi alasan ideologis membentuk kecenderungan untuk menjauh dari proses perdamaian yang telah berupaya dibangun sebelumnya. Kecenderungan ini terlihat pasca menguatnya pengaruh kelompok-kelompok sayap kanan yang dipengaruhi oleh ide-ide Zionisme Revisionis. Benyamin Netanyahu merupakan tokoh terpenting dari kelompok tersebut dewasa ini yang banyak amenggunakan narasi yang kental akan nuansa ideologis.²

Zionisme merupakan bentuk modern dari narasi tradisional Yahudi dan berbagai spektrum politik di Israel menjadikan Zionisme sebagai akar ideologis mereka. Ideologi ini lahir dari kerinduan bangsa Yahudi untuk memiliki negeri sendiri di tengah kondisi mereka

¹ Neta Oren, Daniel Bar-Tal, and Ohad David, "Conflict, Identity, and Ethos: The Israeli-Palestinian Case," dalam *The Psychology of Ethnic and Cultural Conflict*, diedit oleh Yueh Ting Lee (Charlottesville: University of Virginia Press, 2004), Hal. 136.

² Yehudith Auerbach, "National Narratives in a Conflict of Identity," dalam *Barrier to Peace in Israel Palestinian Conflict*, diedit oleh Yacoof Bar-Siman Tov (Yerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2010), Hal. 99

yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam narasi ideologis ini, kerinduan akan tanah leluhur tersebut terus terpelihara karena selama berabad-abad praktik diskriminasi dan persekusi terus dilakukan kepada mereka. Narasi seperti inilah yang dikembangkan lebih jauh oleh Theodore Herzl di dalam bukunya yang berjudul *The Jewish Land* yang masih menjadi panduan ideologis para politisi Israel dewasa ini.³

Banyak orang Yahudi yang melakukan migrasi ke Palestina berdasarkan narasi Zionisme ini. Proses migrasi ini bukannya tanpa masalah karena di Palestina telah bermukim masyarakat Arab selama berabad-abad. Narasi untuk kembali ke tanah Zion yang pada awalnya tidak terlalu populer karena kendala praktikal ini semakin memperoleh momentum ketika bangsa Yahudi menjadi korban pembersihan etnis pada era Nazi di Eropa. Pembersihan etnis ini kembali mengingatkan perkataan Herzl beberapa dekade sebelumnya bahwa tanpa negara sendiri bangsa Yahudi akan terus didiskriminasi dan bahkan dilenyapkan di berbagai penjuru dunia. Migrasi besar-besaran bangsa Yahudi ini merubah demografi Palestina dan menyisakan konflik yang masih berlanjut hingga dewasa ini.

Ide dan pemikiran Herzl masih dapat ditemukan pada elit-elit Israel dewasa ini. Netanyahu yang merupakan perdana menteri Israel sekarang menyatakan bahwa keberadaan Israel penting untuk menjamin keselamatan bangsa Yahudi dan hanya mungkin tercapai berkat kejeniusan Theodore Herzl. Ide tradisional untuk kembali ke tanah Zion yang telah dipelihara ribuan tahun berhasil ditrasformasikan menjadi ideologi modern. Ideologi yang menggerakkan bangsa Yahudi untuk membangun negeri mereka sendiri dan bertahan ditengah permusuhan bangsa Arab yang mengelilingi mereka. Israel juga berhasil

³ Theodore Herzl, *The Jewish State* (Washington: American Zionist Emergency Council, 1946), Hal. 5

membangun negara demokratik di tengah otoritarianisme negara-negara Arab, walaupun pasca disahkannya *basic law* yang baru status ini kembali dipertanyakan. Israel juga berhasil membangun militer yang kuat dan ekonomi yang maju. Semua pencapaian tersebut diinspirasi oleh Herzl, demikian yang diyakini oleh Netanyahu.⁴

Narasi ideologis tersebut juga terlihat ketika membicarakan status atas Yerusalem dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.⁵ Pentingnya status Yerusalem dan Tepi Barat dapat dipahami dalam kerangka ideologis yang melingkupi isu itu. Yerusalem terus menjadi objek yang diperebutkan oleh kedua komunitas tersebut sebagai penanda identitas mereka. Tepi Barat yang seharusnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina pasca perdamaian Oslo juga menjadi masalah yang masih menghalangi perdamaian. Pemukiman bagi komunitas Yahudi yang telah dibangun di sana sebagian juga didorong oleh alasan-alasan ideologis. Pemerintahan Israel di bawah Partai Likud bahkan mendorong aneksasi atas pemukiman tersebut yang sebagian berdasarkan alasan yang sama, walaupun sudah jelas bahwa hal tersebut melanggar perjanjian internasional.⁶

Sikap keras menyangkut kepemilikan tanah ini terinspirasi oleh pemikiran Jabotinsky yang tanpa kompromi jika menyangkut tanah tradisional bangsa Yahudi. Netanyahu menyebut sikap Jabotinsky yang tanpa kompromi ini sebagai antitesis dari beberapa tokoh Zionis lainnya yang cenderung liberal. Dia menyatakan bahwa Jabotinsky merupakan salah

⁴ Benyamin Netanyahu, *A Durable Peace: Israel and Its Place Among Nations* (New York: Warner Books, 2000).

⁵ Paolo Napolitano, *Jerusalem: The Heart of Israeli Palestinian Conflict* (Brussel: European Parliament, 2012).

⁶ Rami Amichay, "Likud Party Calls for De-Facto Annexation of Israeli Settlements," *Reuters*, 31 Desember 2017, <https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-likud/likud-party-calls-for-de-facto-annexation-of-israeli-settlements-idUSKBN1EP0M2>, (Diakses 01-03-2017).

satu pemimpin penting Zionisme Revisionis yang menjadikan keselamatan bangsa Yahudi di atas segalanya dan jika perlu dengan jalan kekerasan, bahkan Netanyahu beberapa kali mengutip Jabotinsky di dalam bukunya.⁷

Dalam kerangka menjamin keselamatan bangsa Yahudi inilah alasan berdasarkan ideologi termasuk narasi keagamaan juga dipergunakan untuk saling meniadakan hak atas eksistensi komunitas lainnya. Narasi ini sering dipakai dalam klaim wilayah maupun legitimasi atas penggunaan kekerasan terus menerus⁸. Narasi yang sama juga mendorong perilaku ekstrimis yang terus berulang diantara beberapa kelompok yang menyokong pemerintahan Netanyahu. Contoh penggunaan narasi ideologis itu terlihat dari pernyataan para petinggi partai maupun dokumen resmi organisasi. Walaupun banyak yang menggambarkan bahwa konflik Israel Palestina ini adalah murni konflik berdasarkan keagamaan tetapi Partai Likud yang merupakan partai yang berkuasa di Israel sekarang pada dasarnya bukanlah partai keagamaan. Seperti kebanyakan partai politik di sana, ideologi yang dominan adalah Zionisme dan varian Revisionis itu sendiri pada dasarnya bercorak sekuler. Hanya saja sikap tanpa kompromi mereka menyangkut Yerusalem dan Tepi Barat lebih dapat diterima ditengah segmen masyarakat yang lebih relijius. Di tengah menguatnya kelompok sayap kanan di Israel, narasi etnisitas dan keagamaan semakin membatasi pilihan di dalam perundingan terutama menyangkut Yerusalem dan pemukiman di Tepi Barat.⁹

⁷ Netanyahu, *A Durable Peace*, Tanpa Halaman.

⁸ Stephanie Claire Mitchell, *The Function of Religion in Israel Palestinian Conflict* (Portland: Portland State University Press, 2017), 24-28.

⁹ Peter Lintl, *The Dynamics of a Right - Wing Coalition How the Failure of the Peace Processes Encourages Domestic Populism in Israel* (Berlin: German Institute for International and Security Affairs, 2016), 5-7.

Konflik berdasarkan identitas etnis dan keagamaan diperburuk dengan pengalaman sejarah di antara kedua komunitas sejak tahun 1947 ketika Palestina dibagi mengikuti garis etnis dan agama. Berdasarkan peristiwa sejarah dan isu identitas itu pula hubungan yang konfliktual dipelihara dan dilestarikan terutama pasca menguatnya kelompok-kelompok sayap kanan di kedua sisi. Di sisi Israel puncak dari perjuangan ideologis ini adalah dengan disahkannya Israel sebagai negara Yahudi. Netanyahu dan politisi sayap kanan negara itu bersikeras untuk meloloskan rancangan undang-undang yang menjadi fondasi konstitusional negara itu. Identitas negara Israel merupakan latar belakang diajukannya undang-undang itu dan dengan disahkannya undang-undang ini Israel meneguhkan secara resmi bahwa negara itu adalah negara Yahudi. Hal ini merupakan cita-cita ideologis yang telah diimpikan sejak lama dan mengundang kontroversi di berbagai kalangan termasuk kelompok Arab Israel maupun sayap kiri di dalam spektrum politik di negara itu.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas maka penulis akan fokus pada faktor ideologi dari sisi Israel menyangkut kebijakan mereka terhadap Palestina. Konflik berkepanjangan tidaklah menguntungkan bagi Israel dan Palestina. Perebutan atas status Yerusalem dan pemukiman di Tepi Barat memiliki logika tersendiri yang hanya bisa dipahami jika kita juga memahami ideologi di balik kebijakan tersebut. Memahami konteks munculnya Zionisme dan meningkatnya pengaruh kelompok Revisionis setelah Zionisme ditanamkan di Palestina dan bagaimana reaksi orang Arab terhadap gerakan ini sangat penting. Bagaimana narasi yang dipergunakan dalam membentuk pandangan dunia merupakan hal yang juga menarik untuk dikaji, hal itulah yang akan menjadi fokus kajian tesis ini.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Meningkatnya pengaruh kelompok sayap kanan yang ditandai oleh kemenangan mereka dalam beberapa pemilu yang mengantarkan Benyamin Netanyahu sebagai perdana menteri semakin memperdalam konflik yang terjadi terutama menyangkut status atas Yerusalem dan Tepi Barat. Cara berpikir aktor dalam melanggengkan konflik tersebut sulit dijelaskan jika mengabaikan faktor ideologi. Bagi Israel perdamaian permanen dengan Palestina merupakan pintu gerbang bagi mereka untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas dari dunia Arab dan Muslim. Di sisi Palestina, perang berkepanjangan justru lebih merugikan. Secara relatif Palestina lebih lemah dalam kemampuan militer dan ekonomi bila dibandingkan dengan Israel. Kondisi konflik berkelanjutan dengan Israel hanya akan menyulitkan Palestina.¹⁰

Narasi ideologis membentuk dan melanggengkan konflik kedua komunitas itu. Perbedaan identitas yang mendalam menjadi ancaman dan membatasi kemungkinan akan potensi perdamaian. Sikap moderat sepertinya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi norma kelompok masing-masing. Prospek perdamaian juga dipersulit oleh para elit yang terus menerus mempergunakan narasi ideologis. Mereka menjadikan keberadaan kelompok lainnya sebagai ancaman eksistensial yang memperkeruh konflik tersebut. Di sinilah perlunya kita mengkaji mengenai proses pembentukan identitas di dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Proses pembentukan identitas itu selain dibentuk oleh interaksi antar kelompok juga dibentuk oleh narasi yang digunakan oleh elit politik Israel seperti Netanyahu

¹⁰ Ross Anthony, et.al., *The Cost of Israel – Palestinian Conflict*, (Santa Monica: Rand Corporation, 2015), 64.

dan anggota koalisi pemerintahannya. Narasi yang membentuk pandangan dunia masyarakat Israel menyangkut penyelesaian status Yerusalem dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Sesuai dengan masalah yang telah penulis identifikasi, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“Penggunaan Narasi “Kembali ke Tanah Leluhur” Zionisme Revisionis oleh Benjamin Netanyahu dalam Klaim atas Yerusalem dan Tepi Barat 2009- Juli 2018”**

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi pembahasan mengenai bagaimana memahami narasi Zionisme Revisionis dalam klaim atas Yerusalem dan Tepi Barat. Pemerintahan Israel dewasa ini didominasi oleh kelompok sayap kanan dengan Partai Likud dan Benjamin Netanyahu sebagai aktor utamanya. Kemenangan kelompok-kelompok ini diikuti oleh menguatnya narasi Zionis Revisionis sayap kanan yang bersifat agresif dan non-kompromis. Rentang waktu pembahasan akan dibatasi pasca kemenangan Partai Likud dan koalisi sayap kanan pada pemilihan umum Israel pada tahun 2009 hingga Juli 2018.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang penulis coba untuk identifikasi, maka penulis merumuskan pertanyaan dari penelitian ini. Rumusan pertanyaan penelitian ini adalah **“Bagaimana penggunaan narasi “kembali ke tanah leluhur” Zionisme Revisionis oleh Benjamin Netanyahu dalam klaim atas Yerusalem dan Tepi Barat?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penggunaan narasi Zionisme Revisionis di dalam memahami perilaku dan kebijakan pemerintah Israel di bawah Benjamin

Netanyahu. Kemenangan kelompok Zionis sayap kanan di Israel menjadi contoh bahwa isu identitas yang diprediksi akan melemah pasca globalisasi, justru semakin banyak dipergunakan di berbagai belahan dunia dan memperoleh simpati publik. Akan lebih masuk akal jika kita juga mempelajari identitas termasuk ideologi suatu negara dalam memahami perilaku dan kebijakan yang dilakukan oleh negara tersebut. Pandangan ini juga dapat diterapkan dalam memahami bagaimana kebijakan Israel menyangkut Yerusalem dan Tepi Barat. Oleh karena itu penulis berharap bahwa pemahaman akan peranan isu identitas akan semakin mendapatkan perhatian dalam studi hubungan internasional yang selama ini cenderung diabaikan.

Kegunaan penulisan ini sendiri adalah untuk memberikan sudut pandang yang berbeda kepada akademisi dan praktisi yang berminat di dalam mempelajari konflik Israel dan Palestina. Selama ini kajian yang dominan dalam mengkaji permasalahan ini cenderung mengabaikan ideologi, interaksi dan narasi yang dipergunakan di dalam konflik tersebut. Pemahaman akan konteks dan intersubjektifitas akan permasalahan tersebut penting karena konflik akan terus bertahan selama interaksi dan narasi yang konfliktual terus dipelihara di dalam hubungan diantara kedua komunitas. Sehingga di masa depan aktor yang terlibat di dalam proses perdamaian dapat fokus menciptakan suasana interaksi dan narasi yang lebih bersahabat diantara kedua komunitas.

1.4 Tinjauan Literatur

Literatur pertama yang menjadi pedoman yang diterbitkan pada tahun 2010 ini bermaksud untuk menjelaskan dinamika konflik Israel dan Palestina dari sudut pandang Etnopolitik.¹¹ Beberapa perundingan dan kesepakatan telah tercapai tetapi pada akhirnya gagal karena berbagai sebab. Kass memberikan beberapa alasan mengapa kesepakatan damai sangat sulit untuk dicapai. Seperti yang kita ketahui, alasan identitas seperti kultural dan relijius tidak selalu berujung konflik tetapi hal itu seringkali dipersulit akibat buruknya komunikasi dan interaksi interkultural. Halangan berikutnya diakibatkan keenganan masing-masing pihak untuk berkompromi atas isu-isu tertentu terutama sikap kelompok-kelompok ekstrimis yang cenderung memperdalam kebencian antar kelompok. Terakhir, para pemimpin di kedua sisi juga menggunakan narasi dan justifikasi historis akan hak mereka sebagai pemilik tunggal dari Yerusalem dan Tepi Barat. Alasan identitas dan simbol yang mengikutinya sangat berkontribusi terhadap daya tahan konflik tersebut ditengah berbagai upaya untuk menyelesaikannya. Kass memberikan solusi tentang perlunya membangun interaksi yang lebih baik diantara kedua komunitas tersebut dan memperkuat kelompok. Solusi ini sendiri sulit diterapkan karena kebencian sudah mengakar mendalam diantara kedua komunitas tersebut akibat politisasi isu-isu primordial tersebut.

¹¹ Mark Kass, "Israel and Palestine: An Unbridgeable Chasm for Conflict Resolution?", dalam *Global Review of Ethnopolitic*, Vol. 3 (2004): 75-81

Literatur kedua memulai dengan membagi penyebab konflik Israel dan Palestina berdasarkan alasan material dan identitas.¹² Faktor material itu antara lain menyangkut hal seperti wilayah, air, perbatasan, keamanan dan sejenisnya. Dimana permasalahan ini sering diselesaikan melalui meja perundingan dan diplomasi. Terdapat dimensi lain yang lebih sulit untuk diselesaikan, yaitu jika sudah menyangkut identitas beserta simbol-simbol yang menyertainya. Konflik berdasarkan identitas tersebut dapat berupa etnis, agama, maupun jalinan di antara kedua hal tersebut. Konflik Israel dan Palestina pada dasarnya diwarnai nuansa identitas tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh retorika yang digunakan dimana satu sama lain saling menegaskan hak kelompok lainnya di tanah Palestina. Identitas nasional dibentuk dan diperkuat oleh narasi yang bertujuan untuk memperkuat kohesi internal kelompok yang juga disebut sebagai mitos. Narasi tradisional tersebut mendefinisikan identitas bangsa dan bagaimana identitas membentuk praktik yang sesuai dengan ekspektasi narasi tersebut. Pemerintah maupun media massa menggunakan narasi tersebut baik untuk melegitimasi kebijakan mereka ataupun mendapatkan dukungan dari masyarakat. Di sinilah sulitnya menemukan kata sepakat jika alasan identitas dan ideologis sudah dibawa ke atas meja perundingan. Jika hal ini dilakukan kemungkinan untuk melakukan kompromi menjadi semakin sulit. Alasan ideologis berdasarkan identitas ini juga yang mampu menjadikan konflik Israel dan Palestina memiliki daya tahan yang sulit dijelaskan menggunakan alasan rasional. Artikel ini dapat memberikan penjelasan yang lebih baik tentang peran identitas,

¹² Yehudit Auerbach, "National Narratives in a Conflict of Identity", dalam *Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict*, diedit oleh Yaacov Bar-Siman-Tov (Yerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies).

narasi dan simbol yang mengikutinya. Penulis setuju dengan penulis artikel ini bahwa konflik Israel dan Palestina tidak sekedar perjuangan atas alasan material semata.

Literatur ketiga membahas pengaruh agama dalam memperkeruh konflik Israel dan Palestina.¹³ Reiter menyoroti pengaruh yang semakin kuat dari kelompok-kelompok yang menggunakan isu keagamaan di dalam konflik tersebut. Narasi keagamaan juga menjadi pembenaran atas penguasaan wilayah oleh kelompok keagamaan dari sisi Israel maupun Palestina. Para pemukim Yahudi dimotivasi oleh ide keagamaan yang memperoleh dukungan dari pemerintahan sayap kanan Israel. Di sisi lain komunitas Muslim Palestina menggunakan justifikasi bahwa perjuangan melawan pendudukan Israel merupakan salah satu bentuk jihad. Perjuangan yang akan menjamin syahid jika kaum Muslimin turun ke medan peperangan. Hal inilah yang memudahkan mereka dan kelompok bersenjata mereka merekrut banyak pemuda untuk bergabung di dalam perjuangan mereka. Untuk mengategorikan sebuah konflik dilandasi oleh ide keagamaan, Reiter menyatakan bahwa beberapa syarat harus terpenuhi. Hal pertama adalah bahwa konflik yang terjadi memiliki justifikasi keagamaan yang membenarkan terjadinya konflik secara terus menerus. Di samping justifikasi keagamaan yang dipergunakan, ide religius juga telah menyebar luas di tengah masyarakat yang ditandai dengan semakin menguatnya peran kelompok keagamaan. Bahkan pada tahap ini kelompok yang pada dasarnya sekuler pada akhirnya harus mempertimbangkan suara kelompok religius. Fase terakhir adalah semakin diterimanya narasi ekstrimis dan perekrutan milisi bersenjata

¹³ Yitzhak Reiter, "Religion as a Barrier to Compromise in the Israeli-Palestinian Conflict", *Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict*, diedit oleh Yaacov Bar-Siman-Tov (Yerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies).

atas nama perjuangan keagamaan. Tidak seperti Reiter yang mendasari argumennya dengan alasan keagamaan semata, penulis berpendapat bahwa ideologi merupakan alasan penting yang mendasari konflik terus berlangsung terutama menyangkut status Yerusalem dan Tepi Barat.

Kesimpulan dari ketiga tulisan tersebut adalah bahwa ada halangan kognitif berdasarkan alasan ideologis. Masalah yang tidak dibahas secara jelas dari ketiga artikel tersebut adalah ideologi apa yang dimaksud terutama di sisi Israel? Mengapa posisi pemerintah Israel dewasa ini semakin mengeras? Di sini penulis akan fokus pada perubahan ideologi dan penggunaan narasi oleh kelompok sayap kanan Zionis Revisionis terutama dalam masa pemerintahan Benjamin Netanyahu di Israel.

1.5 Kerangka Pemikiran

Peran identitas dan norma dalam membentuk perilaku negara merupakan fokus kajian tesis ini. Sebagian ahli ilmu Hubungan Internasional menggunakan apa yang telah dikembangkan di dalam teori sosial, yaitu Konstruktivisme. Di tengah dominasi Realisme pada masa Perang Dingin, paradigma ini diabaikan karena dianggap tidak cukup ilmiah dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional. Para ilmuan Hubungan Internasional saat itu yang dipengaruhi oleh Positivisme berambisi menjadikan teori-teori Hubungan Internasional memiliki daya prediksi yang mendekati ilmu alam. Mereka menyatakan bahwa perilaku manusia, dalam hal ini negara pasti akan sama jika dihadapkan kepada situasi yang sama. Mereka berambisi menemukan hukum universal di dalam perilaku manusia yang tidak mengenal perbedaan tempat dan waktu. Hal inilah yang kemudian dikritisi oleh kaum Konstruktivis, karena perilaku manusia, termasuk negara bukanlah sesuatu yang tetap dan

tidak dapat berubah.¹⁴ Ada hal di luar perhitungan rasional yang mendasari perilaku Negara dan dalam konteks Timur Tengah, paradigma Konstruktivis ini memberikan penjelasan yang berbeda.¹⁵

Dalam memahami logika aktor di dalam berperilaku terdapat perdebatan diantara kaum Rasionalis dan Konstruktivis. Kelompok yang pertama menganalisa dan memprediksi perilaku negara dengan berasumsi bahwa negara adalah aktor rasional yang mementingkan untung rugi material ketika menghasilkan sebuah kebijakan. Asumsi dari cara pandang ini adalah bahwa terlepas dari konteks sosial aktor, ketika mereka melakukan sebuah aksi pertimbangannya hanyalah maksimalisasi keuntungan dan meminimalisir kerugian. Thomas Risse mengutip March dan Olsen menyebut ini *Logic of Consequentialism*.¹⁶ Disisi lain kaum Konstruktivis berpendapat bahwa perilaku aktor termasuk negara tidak bisa terlepas dari konteks sosial mereka. Konteks sosial menyediakan pilihan kebijakan yang pantas yang harus diambil oleh aktor. Aktor tidak bisa sepenuhnya rasional dalam pengertian untung rugi karena perilaku aktor dibimbing oleh norma dimana dia berada (*Rule-guided behavior*), Risse kembali mengutip March dan Olsen yang menyebut ini sebagai *Logic of Appropriateness*.¹⁷ Di dalam memahami perilaku Netanyahu di Israel konsep yang disebutkan di atas sangat berguna untuk memahami kebijakannya menyangkut Yerusalem dan Tepi Barat dan di sinilah mengapa sumbangan Konstruktivisme di dalam isu ini menjadi relevan.

¹⁴ K.M. Fierke, "Constructivism," dalam *International Relation Theories: Discipline & Diversity*, diedit oleh Tim Dunne, Milya Kurki & Steve Smith (Oxford: Oxford University Press, 2010), 188.

¹⁵ Louise Fawcett, *International Relations of the Middle East* (New York: Oxford University Press, 2005).

¹⁶ Thomas Risse, "Let's Argue", dalam *International Organization*, Vol. 54, No. 1 (2000): 3

¹⁷ Ibid.

Konstruktivisme seperti paradigma lainnya memiliki beberapa konsep dasar yang penting. Audie Klotz dan Cecelia Lynch di dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat tiga konsep dasar konstruktivisme. Ketiga konsep tersebut adalah: intersubjektif (*intersubjective*), konteks (*context*) dan kekuatan (*power*).¹⁸ Ketiga hal tersebut penting dalam memahami bagaimana agen bertindak di dalam struktur dan bagaimana struktur berubah karena agen. Ketika membahas tentang peran identitas di dalam membentuk perilaku negara, ketiga hal tersebut penting untuk diamati. Agen bertindak tidak di dalam ruang kosong tanpa norma atau berdasarkan penilaian rasionalitas untung rugi belaka. Negara melalui para elitnya hidup di dalam norma yang merupakan bentuk institusionalisasi dari intersubjektivitas tersebut. Norma menyediakan konteks bagaimana seharusnya seharusnya elit tersebut bertindak di dalam konteks identitasnya. Memahami *power* penting karena norma yang diterima merupakan hasil dari dominasi narasi dominan di dalam masyarakat yang menyampingkan narasi alternatif

Konstruktivisme juga memperkenalkan konsep *structuration* ke dalam teori Hubungan Internasional. Anthony Giddens mengembangkan konsep ini dan kemudian Alexander Wendt memperkenalkannya ke dalam ilmu Hubungan Internasional.¹⁹ Konsep ini berupaya untuk menyelesaikan perdebatan tentang sejauh mana peran agen dan struktur di dalam hubungan sosial. Sebagian pakar menyatakan bahwa agen bersifat otonom di dalam hubungannya dengan masyarakat. Pakar lainnya menyatakan bahwa struktur menentukan perilaku individu di dalam hubungan sosial. Penekanan pada struktur mengingatkan kita

¹⁸ Audie Klotz & Cecelia Lynch, *Strategies for Research in Constructivist International Relation* (New York: M.E. Sharp, 2007), 7.

¹⁹ Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of It," *International Organization Vol. 46* (1992): 394.

kepada teori-teori arus utama hubungan Hubungan Internasional terutama teori-teori struktural tentang perilaku negara. Teori *structuration* menjelaskan bahwa agen dan struktur saling membentuk perilaku di dalam hubungan sosial.²⁰ Para Konstruktivis berpendapat konsep ini penting di dalam studi Hubungan Internasional. Mereka menyatakan jika perilaku agen berubah, maka struktur pun dapat berubah. Sebaliknya jika struktur berubah, maka perilaku agen juga dapat berubah. Konsep *security dilemma* yang selama ini diangungkan oleh kaum Realis dapat dicegah untuk terus mereproduksi hubungan konflikual di antara negara-negara.²¹

Bagaimana caranya negara membebaskan diri dari *security dilemma* dan terjadi perubahan di dalam struktur internasional menjadi lebih kooperatif? Interaksi dan sosialisasi merupakan faktor penting di dalam proses tersebut. Konstruktivisme memperkenalkan konsep lainnya, yaitu *symbolic interactionism*.²² Konsep ini menyatakan bahwa perilaku agen ditentukan oleh bagaimana mereka menerjemahkan sinyal yang dikirimkan oleh agen lainnya. Jika sinyal yang dikirimkan bernuansa permusuhan, maka agen lainnya akan mengirimkan sinyal yang juga bermusuhan. Perselisihan akan direproduksi dan konflik akan terus terjadi. Hal berbeda dapat terjadi jika agen mengirimkan sinyal bersahabat dan agen lain memberikan sinyal yang juga bersahabat. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan membangun rasa saling percaya di antara satu dan lainnya. Interaksi terus menerus akan

²⁰ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relation Theories* (Oxford: Oxford University Press 2010), 210.

²¹ Alexander Wendt, "Constructing International Politics," *International Security Vol. 20* (1995), 77.

²² Wendt, "Anarchy is What States Make of It," 404.

membangun kepercayaan dan identitas serta pemaknaan baru dari hubungan dua agen yang sebelumnya bermusuhan tersebut.

Terdapat beberapa konsep penting dalam melihat bagaimana identitas dipahami dalam kerangka ini. Alexander Wendt membagi struktur sosial menjadi beberapa bagian, yaitu sumber daya material, pengetahuan bersama, dan praktek.²³ Sumber daya material tanpa pemaknaan melalui pengetahuan bersama tidaklah berarti. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menjabarkan komponen struktur sosial ini lebih detail. Selain ketiga hal di atas juga mencakup aturan, norma dan keyakinan dari para agen di dalam struktur tersebut.²⁴ Praktek sangat penting karena fakta sosial tidaklah semata ide maupun hal material di luar sana tetapi ada akibat praktek tersebut. Praktek didahului oleh pengetahuan bersama, salah satunya adalah identitas itu sendiri.

Identitas dan kepentingan (*interest*) saling berkaitan karena kepentingan aktor ditentukan oleh konteks sosial mereka.²⁵ Identitas didefinisikan sebagai bagaimana individu atau kelompok memandang “diri sendiri” yang muncul akibat kita berinteraksi dengan pihak “lainnya”. Individu dan kelompok dalam mendefinisikan “diri sendiri” tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses mendefinisikan pihak lainnya yang kita anggap berbeda dari kita. Identitas memiliki norma dan aturan dimana agen di dalam struktur sosial tersebut diharapkan bertindak sesuai dengan ekspektasi dari norma yang bersangkutan. Norma dan aturan tidak bersifat permanen dan seiring waktu akan berubah sesuai dengan interaksi antar

²³ Wendt, “Constructing International Politics,” 73.

²⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relation Theories* (Boston: Longman, 2012), 287.

²⁵ Wendt, “Anarchy is What States Make of It”, 398.

agen.²⁶ Agen dan norma saling membentuk satu sama lain termasuk persepsi atas pihak lain, apakah sebagai teman atau musuh. Identitas membentuk persepsi tersebut dan sekaligus persepsi dapat membentuk identitas. Konsep yang telah disinggung sebelumnya, yaitu *symbolic interactionism*. Persepsi di dalam konflik Israel dan Palestina adalah konflik yang dibentuk melalui jargon identitas. Selama hal ini tidak dilampaui, maka akan sulit mencapai perdamaian

Wendt juga menjelaskan hubungan di antara kepentingan (interest) dan identitas (*identity*) di dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa identitas menyatakan tentang apa dan siapa aktor tersebut. Sedangkan kepentingan menyatakan apa yang aktor mau. Hubungan di antara identitas dan kepentingan tersebut penting dipahami karena keduanya saling mempengaruhi aktor di dalam perilakunya. Wendt menyatakan tanpa kepentingan aktor tidak memiliki motivasi, tetapi tanpa identitas kepentingan tadi tidak memiliki konteks dan tujuan yang jelas. Kedua hal tersebut pada akhirnya akan mewujudkan menjadi praktek dan aksi nyata. Dalam konteks negara dapat berbentuk kebijakan politik.²⁷ Kepentingan tidak semata upaya mendapatkan keuntungan material. Faktor Identitas penting dalam memahami konteks mengapa kepentingan material tertentu diperjuangkan.

Pentingnya identitas dan perubahannya untuk melihat bagaimana suatu negara berperilaku juga dijelaskan oleh Katzenstein di dalam bukunya. Norma dan identitas mempengaruhi perubahan kepentingan, tidak semata alasan-alasan material.²⁸ Katzenstein

²⁶ Ibid., 288.

²⁷ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 231.

²⁸ Peter J. Katzenstein, *The Culture of National Security* (New York: Columbia University Press, 1996), 1.

mendefinisikan norma sebagai ekspektasi kolektif yang membatasi perilaku yang pantas dilakukan oleh aktor agar sesuai dengan identitas yang disandangnya. Katzenstein juga menyatakan bahwa norma tidak hanya membatasi pilihan perilaku yang tersedia bagi para aktor (*regulative*) tetapi juga membentuk identitas mereka (*constitutive*) ketika berhubungan dengan aktor lainnya. Identitas diartikan sebagai label yang diberikan sebagai bagian dari upaya membentuk atau mengkonstruksi suatu kelompok, baik bangsa ataupun negara. Ideologi merupakan alat yang digunakan untuk membentuk dan menekankan keunikan serta tujuan bersama suatu kelompok.²⁹ Penekanan atas keunikan kelompok ini penting sebagai pembeda antar “kita” dan “mereka” beserta konsekuensi yang mengikutinya di dalam hubungan sosial antar kelompok. Identitas dan norma yang saling membentuk satu sama lain serta pentingnya memahami konteks sosial menjadi kunci dalam memahami tulisan tersebut dan hubungannya dengan perilaku negara.

Terlihat jelas dari penjelasan di atas bahwa alasan material dan rasional tidak selalu mampu menjelaskan perilaku aktor tanpa memahami identitas dan ideologis yang mendasarinya. Identitas yang disandang juga membatasi pilihan aksi yang dapat dilakukan oleh aktor tersebut di dalam hubungannya dengan aktor lain agar sesuai dengan norma kelompok. Jika tembok pembatas antara satu kelompok dan kelompok lainnya sudah sedemikian tinggi, maka pilihan untuk bekerjasama dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan oleh kelompok masing-masing. Ini dipersulit oleh peran kelompok-kelompok garis keras. Dalam kasus Israel peran ini diambil oleh Partai Likud dan disini Palestina peran

²⁹ Ibid., 11.

ini diambil oleh Hamas. Mereka sukses menggunakan isu identitas dan ideologis melebihi kelompok moderat.

Bagaimana isu identitas itu dipergunakan sering melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para elit politik maupun tokoh-tokoh yang mewakili komunitas tersebut. Melalui pernyataan para tokoh itulah kita bisa mempelajari perilaku dan logika di balik kebijakan tersebut. Melalui narasi identitas itulah kebijakan yang mengikutinya dibenarkan dalam kerangka norma dan identitas aktor tersebut. Nicholas Onuf sebagai salah satu ahli yang memperkenalkan Konstruktivisme ke dalam ilmu Hubungan Internasional. Dia memperkenalkan konsep "*speech act*" ke dalam teori Hubungan Internasional yang dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana narasi dipergunakan dalam membentuk pandangan dunia kelompok-kelompok yang terlibat di dalam konflik. Hal ini pada saat yang bersamaan juga menunjukkan bahwa narasi yang dipergunakan merupakan perwujudan pandangan dunia dimana aktor tersebut dibesarkan. Narasi dan pandangan dunia merupakan dua sisi mata uang yang saling membentuk sama sama lainnya (*co-constitutive*).

Onuf membagi "*speech act*" menjadi tiga, yaitu *assertive*, *directive* dan *commissive*.³⁰ Pertama adalah *assertive*, di dalam tahapan ini aktor menyatakan tentang urgensi suatu isu. Aktor menjelaskan tentang pentingnya isu tersebut untuk diselesaikan kepada para pendengarnya. Jika dikaitkan dengan isu identitas, maka para aktor tersebut berupaya menunjukkan kepada komunitasnya bahwa mereka berbeda secara fundamental dengan komunitas lainnya. Dapat berbentuk narasi tentang keberadaan kelompok kita yang terancam

³⁰ Nicholas Onuf, "Constructivism: A User's Manual," dalam *Making Sense Making World* diedit oleh Nicholas Onuf (London: Routledge, 2002), 10.

oleh komunitas lainnya maupun identifikasi “kita” dan “mereka” yang dibentuk melalui kata-kata para elit tersebut.

Tahap kedua disebut dengan tahap *directive*. Aktor menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, solusinya seringkali juga melibatkan cara tidak biasa yang diikuti dengan pembenaran tertentu. Dalam konteks konflik antar kelompok, para aktor akan menggunakan narasi keberlangsungan hidup kelompok. Mereka menuntut dilakukan tindakan tertentu seperti legitimasi penggunaan kekerasan maupun militer kepada kelompok lainnya. Berdasarkan narasi identitas seperti ini, suara kelompok moderat dibungkam pada saat yang bersamaan. Atas nama keberlangsungan kelompok hanya jalan kekerasan yang memungkinkan untuk dilakukan. Elemen ketiga disebut sebagai *commisive* dimana aktor menjanjikan imbalan jika aksi tersebut dijalankan. Hal tersebut penting dijanjikan karena anggota kelompok memiliki motivasi yang lebih kuat jika ada imbalannya tertentu.

Bob Hadiwinata mengutip Kratochwil di dalam bukunya berpendapat bahwa kunci di dalam memahami konstruktivisme di dalam Hubungan Internasional adalah dengan mempelajari proses interaksi dan pembelajaran yang membentuk perilaku aktor. Proses tersebut dipengaruhi oleh empat Faktor, yaitu 1). *Interest*/kepentingan, 2). *Identity*/identitas, 3). *Intention*/intensi dan 4). *Language*/bahasa.³¹ Proses berdasarkan keempat faktor ini yang akan menentukan apakah hubungan antar kelompok akan bersifat kooperatif atau konfliktual. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan memahami alurnya akan sangat membantu kita memahami bagaimana ideologi dipergunakan di dalam kasus perebutan tanah tersebut.

³¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif & Reflektifis* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 272.

Narasi identitas merupakan komponen penting di dalam memahami mengapa suatu negara bertindak tertentu dalam kebijakan politiknya. Faktor identitas seperti kesamaan sejarah, budaya, bahasa atau ideologi sangat menentukan apakah suatu negara atau komunitas berpotensi untuk terlibat konflik satu sama lain atau tidak. Sekali lagi karena kepentingan sangat ditentukan oleh identitas bukan semata pertimbangan rasional belaka. Jika kita memahami apa esensi dari identitas dan ideologi itu, maka kita dapat mempelajari apa intensi sebenarnya dari kebijakan yang diambil menyangkut isu tertentu.

Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kebijakan tersebut bernuansa ideologis? Tentu saja sulit untuk mengetahui isi pikiran para aktor tersebut. Hal yang menarik adalah untuk mempelajari isi pikiran seseorang dapat dilihat dari bahasa (*language*) yang digunakan oleh mereka termasuk “*speech act*” yang juga telah disebutkan oleh Onuf diatas. Terdapat dua jenis data yang dapat dipergunakan oleh peneliti yang ingin mempelajari intensi dan identitas seseorang melalui media bahasa ini. Pertama adalah “bahan mentah” dan yang kedua adalah “bahan jadi”. “Bahan mentah” seperti “*speech act*” memiliki tingkat orisinalitas yang lebih tinggi dari bahan jadi, karena bahan jadi seringkali telah melalui proses penghalusan yang menyulitkan untuk mengetahui intensi sebenarnya dari aktor. Oleh sebab itu, fokus dalam menganalisa bahan mentah menjadi penting dalam memahami intensi dan ideologi yang mendasari perilaku aktor tersebut.³²

Dalam kerangka seperti yang telah disebutkan di atas kita akan menemukan dan menginterpretasi motif identitas dan ideologi di dalam kebijakan Israel atas Palestina. Bruining menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah keseluruhan kebijakan suatu

³² Ibid., 269-270.

negara baik terhadap negara lain maupun hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya yang melintasi batas nasionalnya. Dalam pengertian tradisional kebijakan ini berupaya untuk memperkuat baik kepentingan dan pengaruh maupun keamanan mereka.³³ Berdasarkan pengertian diatas terlihat jelas pengaruh realisme di dalam merumuskan konsep tersebut. Dia juga menyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan nasionalnya negara tidak berada di kondisi vakum dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah faktor dalam negeri seperti opini publik.³⁴ Bagaimana opini publik terbentuk sangat dipengaruhi oleh bagaimana ideologi dominan di suatu negara. Baik masyarakat ataupun pengambil kebijakan dapat saling mempengaruhi opini umum tersebut melalui penggunaan narasi ideologis.

Ideologi yang mendasari perilaku suatu negara sering dibagi menjadi beberapa spektrum. Istilah yang sering digunakan untuk menggeneralisasi ideologi-ideologi yang berbeda adalah dengan membagi mereka menjadi kanan atau kiri. Sejarah penggunaan istilah kanan dan kiri seperti ini berdasarkan pembagian kursi anggota parlemen Perancis pasca revolusi di sana. Para pendukung monarki dan elit-elit lama duduk di sebelah kanan, pemikiran mereka sering dianggap sebagai reaktif. Di sisi kiri duduk mereka yang anti kepada monarki dan elit-elit lama, dimana mereka cenderung revolusioner.³⁵

Andrew Heywood menjelaskan bahwa pembagian secara ketat seperti ini di masa sekarang sangat sulit diterapkan karena berbagai ideologi yang ada sangat kompleks. Di tengah kompleksitas tersebut terdapat kesamaan tertentu seperti kelompok kiri yang

³³ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 5.

³⁴ *Ibid.*, 6.

³⁵ Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction* (London: Palgrave Macmillan, 2003), 14.

dianggap lebih egalitarian dan toleran serta percaya kepada potensi untuk mencapai masyarakat multikultural. Sedangkan kelompok kanan cenderung menolak persamaan dan skeptis bahwa masyarakat dapat mencapai masyarakat egalitarian dan multikultural ini. Di sisi ekonomi kelompok kiri condong kepada regulasi dan intervensi dari negara untuk menjamin persamaan. Sedangkan kelompok kanan percaya kepada pasar bebas dan perlindungan kebebasan dan hak milik individu.³⁶ Kelompok kanan yang cenderung kepada konservasi nilai tradisional dan stabilitas menjadikan mereka lebih mudah bekerjasama dengan kelompok religius dibandingkan kelompok kiri yang lebih progresif. Dalam konteks Israel kelompok Zionis Revisionis dapat dikategorikan sebagai kanan sedangkan kelompok Zionis Buruh dapat dikategorikan sebagai kiri.

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kualitatif di dalam penelitian ini. Umar Suryadi Bakri mengutip Andrew Bennet dan Colin Elman mendefinisikan jenis penelitian ini sebagai metode penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren.³⁷ Selanjutnya dia juga mengutip pendapat Norman Denzin dan Yvona Lincoln yang menyatakan bahwa tradisi penelitian kualitatif mencakup berbagai metode mulai dari wawancara untuk observasi, analisis wacana dan historis, serta yang sering disebut sebagai penelitian multi metode. Pendapat lain yang dikutip adalah pendapat Liz Spencer yang menyatakan bahwa penelitian

³⁶ Ibid., 15.

³⁷ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 60.

kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengalaman, perspektif dan sejarah orang dalam konteks.³⁸

Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna baik secara individual maupun kelompok mengenai permasalahan kemanusiaan dan sosial. Data yang terkumpul kemudian akan diinterpretasi. Proses generalisasi penting setelah mengumpulkan berbagai data. Bentuk penelitian ini sendiri memiliki struktur yang relatif fleksibel dan pemaknaan sangat penting di tengah kompleksitas fenomena tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif fokus pada data berupa kata daripada angka seperti penelitian kuantitatif. Bentuk penelitiannya sendiri banyak menggunakan studi kasus.³⁹

Yin menyatakan bahwa sulit mendefinisikan penelitian kualitatif. Beragamnya metode dan pemahaman terhadap jenis penelitian ini di samping menjadikannya kaya juga menyulitkan dalam definisinya. Di tengah kesulitan ini dia memberikan lima kriteria dalam memahami penelitian kualitatif ini. Pertama, penelitian ini mempelajari makna di dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Makna ini dapat dipelajari melalui catatan, jurnal, tulisan, bahkan foto. Dalam kondisi ini peneliti akan lebih mudah mendapatkan kesan mengenai makna apa yang dipahami oleh objek dengan lebih apa adanya. Kedua, penting untuk memahami sudut pandang objek yang diteliti dan memahami hal ini merupakan tujuan utama dari penelitian kualitatif. Ketiga, menjelaskan konteks dimana objek tersebut berada dan bagaimana konteks tersebut mempengaruhi perilaku objek yang diteliti. Keempat, berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep yang sudah ada

³⁸ Ibid., 63.

³⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method* (London: Sage, 2014), 32.

maupun konsep baru yang berguna untuk memahami perilaku manusia. Terakhir, menggunakan bermacam-macam sumber daripada hanya mengandalkan satu sumber. Kompleksitas isu-isu kemanusiaan hanya mungkin dipahami dengan menggunakan sumber yang juga beragam.⁴⁰

Penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa jenis. Wood menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif antara lain studi kasus, sejarah hidup, biografi, analisis dokumen dan studi komunitas. Beberapa jenis penelitian kualitatif yang telah disebutkan diatas banyak dipengaruhi oleh sosiologi dan antropologi. Dia juga menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria penelitian kualitatif. Pertama, peneliti meneliti objek penelitiannya di dalam kondisi alamiah objek penelitian tersebut. Dalam pengertian lain peneliti menceburkan diri di dalam kehidupan sehari-hari objek yang diteliti. Kedua, penelitian ini fokus dalam memahami makna, sudut pandang dan pemahaman objek penelitiannya. Ini tentu saja berhubungan dengan poin pertama dimana peneliti harus berbaur dalam kehidupan sehari-hari objek penelitiannya untuk menangkap aspek pemaknaan yang mempengaruhi perilaku objek ini. Ketiga, peneliti fokus pada proses bagaimana pemaknaan tersebut terbentuk. Terakhir penelitian kualitatif tidak harus fokus pada pembuktian teori tetapi mereka dapat fokus pada bagaimana menjelaskan fenomena yang terjadi.⁴¹ Di dalam tesis ini penulis menggunakan teori sebagai kerangka di dalam memahami fenomena yang terjadi. Konstruktivisme dan teori-teori turunannya sangat membantu dalam menjelaskan bagaimana makna dan konteks, yang bentuk konkritnya dalam kasus Israel adalah ideologi Revisionis Zionis, membentuk kebijakan pemerintahan sayap kanan di sana.

⁴⁰ Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (London: Guilford Press, 2012), 7 – 8.

⁴¹ Peter Woods, *Successful Writing for Qualitative Researchers* (London: Routledge, 2006), 2 - 4

Di dalam bukunya, Creswell juga menyinggung tentang bentuk penelitian berdasarkan sudut pandang Sosial Konstruktivis. Dalam bentuk penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjelaskan fenomena sosial melalui sudut pandang objek yang ditelitinya. Dalam konteks ini objek penelitian akan meletakkan makna pada objek atau fenomena sesuai dengan konteks sosial mereka. Makna ini bisa bermacam-macam tetapi peneliti dapat mencari generalisasi dari kompleksitas tersebut. Creswell juga mengutip Crotty yang menjelaskan beberapa asumsi mengenai bentuk penelitian konstruktivis ini. Asumsi pertama adalah manusia menkonstruksi makna dan menginterpretasi dunia dimana mereka hidup berdasarkan makna ini. Untuk memahami makna ini para peneliti dapat mempelajari apa makna yang dipahami oleh objek yang diteliti, biasanya dapat menggunakan wawancara. Asumsi kedua adalah manusia memahami dunia mereka berdasarkan konteks sejarah dan sosial mereka. Disinilah pentingnya para peneliti untuk memahami konteks tersebut. Asumsi ketiga adalah setiap pemaknaan pasti melalui proses interaksi diantara berbagai komunitas, memahami proses interaksi ini penting.⁴²

Di dalam bukunya yang membahas strategi di dalam penelitian menggunakan Konstruktivisme, Audie Klotz dan Cecilia Lynch menyatakan bahwa para peneliti dapat mempelajari makna dan wacana dalam penelitiannya. Material yang bisa dijadikan bahan untuk dianalisis adalah wacana kebijakan (*Policy Discourse*) seperti pidato, debat menyangkut kebijakan tertentu, wawancara maupun dokumen seperti perjanjian ataupun surat-menyurat. Peneliti dapat menginterpretasikan wacana tersebut dan kemudian melihat konsistensinya dengan kebijakan yang dilakukan. Peneliti juga dapat mengkaji norma dan

⁴² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method* (London: Sage, 2014), 37.

identitas melalui bahasa yang dipergunakan oleh para aktor. Memahami bahasa yang dipergunakan dapat lebih jelas jika kita juga memahami konteks dan makna dimana mereka menggunakannya.⁴³

Penulis secara khusus menggunakan metode analisis wacana (*Discourse Analysis*) di dalam memahami perilaku Netanyahu dan menyelami apa yang menjadi ideologi pendorong atas kebijakannya. Menurut Iver B Neumann, analisis wacana berguna untuk menjelaskan mengapa suatu negara lebih memilih kebijakan tertentu dibandingkan dengan kebijakan lainnya. Di dalam tulisannya dia menyatakan bahwa wacana berfungsi menjaga kepantasan perilaku dan pra kondisi yang memungkinkan dipilihnya suatu aksi berdasarkan kepantasan tersebut. Kepantasan itu menyediakan batasan atas kemungkinan pilihan perilaku maupun kebijakan yang mana jika melampaui kepantasan, maka hal itu bukanlah hal yang benar menurut wacana dominan. Memahami wacana ini penting agar kita bisa mempelajari dan memprediksi hasil akhir apa yang akan dilakukan oleh aktor tersebut dengan berkaca pada konteks kultural menurut wacana dominan tersebut.⁴⁴

Memahami wacana tentu saja juga memerlukan pemahaman atas konteks kultural dimana wacana tersebut berasal atau yang dalam istilah Neumann disebut sebagai *cultural competence*.⁴⁵ Pemahaman ini bisa diperoleh melalui mempelajari sejarah dan bahasa negara yang bersangkutan, ideologi dominan hingga pola perilaku aktor-aktor yang mencerminkan wacana dominan tersebut. Mengkaji wacana tanpa pemahaman atas konteks kultural dan historis wacana tersebut akan menjebak kita di dalam kegagalan memahaminya menurut

⁴³ Klotz and Lynch, *Strategies for Research in Constructivist International Relation*, 18-19.

⁴⁴ Iver B Neuman, "Discourse Analysis", dalam *Qualitative Methods in International Relations*, diedit oleh Audie Klotz dan Deepa Prakash (London: Palgrave Macmillan, 2008), 62-63.

⁴⁵ *Ibid*, 63.

objek yang diteliti. Harus disadari bahwa sebagai peneliti kita juga dibesarkan di dalam konteks sosial tertentu sehingga tanpa memahami konteks kultural objek yang diteliti, kita akan terjebak di dalam interpretasi yang penuh bias bawaan kita sebagai peneliti. Dengan memiliki *cultural competence* ini kita dapat meminimalisir bias di dalam interpretasi setelah data dikumpulkan.

Metode penelitian berbasis dokumen merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling banyak dipergunakan oleh para mahasiswa ilmu Hubungan Internasional. Umar Suryadi Bakry di dalam bukunya mengutip pendapat beberapa ahli mengenai jenis-jenis dokumen ini. Salah satu yang dikutip adalah pendapat Peter Burnham, yang menyatakan bahwa dokumen dapat dibagi menjadi dokumen primer, dokumen sekunder, dan dokumen tersier. Dia juga mengutip pendapat Christopher Lamont mengenai dokumen primer dan sekunder.⁴⁶ Para peneliti diharapkan untuk mengakses sebanyak mungkin dokumen primer, tetapi seringkali keterbatasan terhadap akses dokumen-dokumen tersebut memaksa para peneliti untuk mengakses dokumen sekunder sebagai sumber utama penelitiannya. Penelitian berbasis dokumen ini juga dipermudah oleh akses internet yang menjadi alat penting dalam pengumpulan datanya. Tetapi para peneliti harus berhati-hati terhadap penggunaan internet ini, ketelitian dalam memilih data sangat penting karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak terdapat proses *peer review* terhadap data-data di internet.⁴⁷ Kualitas data tentu saja akan menentukan kualitas penelitian yang kita lakukan.

Amanda dan Coffey membahas mengenai penggunaan dokumen ini di dalam artikel mereka. Dalam pandangan mereka dokumen harus diperlakukan sama pentingnya dengan

⁴⁶ Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, 171.

⁴⁷ *Ibid.*, 176.

wawancara atau studi lapangan. Sebagian orang selama ini beranggapan bahwa studi dokumen hanyalah pelengkap studi lapangan seperti etnografi.⁴⁸ Hanya saja dalam mempelajari dokumen ini mereka memberikan beberapa catatan penting seperti jangan menjadikan dokumen tersebut sebagai representasi akurat dari realitas secara apa adanya. Dokumen justru dapat berfungsi membentuk pandangan kita terhadap realitas itu sendiri. Dokumen seringkali telah melalui berbagai proses yang sedikit banyak terdistorsi mengenai kenyataan. Oleh karena itu sikap kritis penting ketika mempelajari dokumen tersebut. Siapa yang memproduksi dokumen tersebut dan kepada siapa ditujukan juga penting untuk dipelajari beserta konteks ketika dokumen tersebut diproduksi.⁴⁹

Di dalam proses pengumpulan data, dewasa ini telah terbiasa menggunakan internet. Seperti bentuk penelitian yang menggunakan media lainnya terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian primer dan sekunder. Perbedaan diantara kedua hal tersebut adalah pada data yang digunakan. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara merupakan bentuk penelitian primer. Data dari buku, dokumen, dan jurnal merupakan bentuk penelitian sekunder.⁵⁰ Di dalam penelitian berbasis internet pembagian ini sama relevannya dengan penelitian lapangan, hanya medianya saja yang berbeda. Selama ini penelitian berbasis internet dianggap tidak memiliki kekuatan yang sama validnya dengan penelitian lapangan. Penelitian berbasis internet memiliki kelebihan dibandingkan penelitian lapangan. Kelebihan ini adalah berlimpahnya data yang tersedia di internet dan mudahnya untuk mengakses data

⁴⁸ Paul Atkinson dan Amanda Coffey, "Analyzing Documentary Realities," dalam *Qualitative Research: Theory, Methode and Practice*, diedit oleh David Silverman (London: Sage, 2010), 59.

⁴⁹ *Ibid.*, 73.

⁵⁰ Claire Hewson, Et.al, *Internet Research Methods: A Practical Guide for the Social and Behavioral Sciences* (London: Sage Publication, 2003), Hal. 1.

tersebut. Kelebihan lainnya adalah biaya yang relatif lebih murah bagi peneliti dalam mengumpulkan bahan-bahan penelitian.⁵¹ Walaupun penelitian berbasis internet ini masih banyak kekurangan, dalam konteks sebagai peneliti amatir sangat membantu di dalam penelitiannya. Terlebih untuk mengumpulkan data bagi penelitian Hubungan Internasional bukanlah hal yang mudah.

Dengan berpedoman kepada penggunaan alat-alat penelitian di atas, peneliti akan mulai melakukan penelitian ini dan menganalisis serta menginterpretasi dokumen baik sumber primer maupun sekunder seperti buku, artikel maupun data lainnya. Karena kebanyakan akses kepada data primer sangat sulit baik karena tidak tersedia maupun kendala bahasa, peneliti akan fokus kepada data sekunder yang kurang lebih menyatakan hal yang sama. Wawancara-wawancara yang dilakukan media maupun pidato-pidato para tokoh yang dapat ditemukan di internet juga akan menjadi bahan untuk peneliti analisa. Selain dokumen maupun pernyataan para tokoh yang telah disebutkan diatas, bahan lainnya berasal dari media cetak maupun elektronik yang berisi berita yang terkait dengan penulisan tesis ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rancangan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta kajian literatur yang mendasari mengapa penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Berdasarkan hal itulah

⁵¹ Ibid., 2.

penulis mencoba untuk meneliti permasalahan tersebut mengikuti kerangka penelitian, metode penelitian dan teknik pengumpulan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai permasalahan itu. Penulis mencoba menerapkan paradigma Konstruktivisme di dalam menganalisa mengenai fenomena yang terjadi.

Bab II Zionisme Revisionis dalam Kebijakan Pemerintahan Netanyahu di Israel. Pada bab ini penulis fokus pada bagaimana ideologi membentuk kebijakan pemerintah Israel. Zionisme tidak dapat kita abaikan jika membahas ide dasar pembentukan Israel dan kebijakan pemerintahnya. Bab ini akan membahas konteks lahir serta ide dasar dari Zionisme yang mendasari pembentukan Israel. Di dalam setiap ideologi tentu terdapat debat internal dan dalam konteks ini Zionisme Revisionis menjadi fokus pembahasan tesis ini. Zionisme Revisionis menawarkan narasi alternatif terhadap bagaimana seharusnya Israel dibangun dan menghadapi kelompok lainnya. Ide kembali ke tanah leluhur membentuk jantung identitas masyarakat Israel dan Yerusalem serta Judea Samaria yang sekarang disebut Tepi Barat menjadi pusat dari permasalahan ini. Posisi pemerintah Israel menyangkut isu Yerusalem dan Pemukiman Yahudi Tepi Barat ini terlihat mengeras terutama pasca beralihnya pemerintahan Israel kepada kelompok Sayap Kanan yang didominasi Partai Likud cenderung enggan untuk berkompromi mengenai hal itu.

Bab III Penggunaan Narasi Zionisme Revisionis Menyangkut Perebutan Yerusalem dan Tepi Barat. Memahami konteks dan intersubjektifitas di sisi Israel menyangkut isu Yerusalem dan Tepi Barat merupakan fokus bahasan bab ini. Penulis berupaya untuk mempelajari bagaimana kebijakan atas kedua wilayah tersebut berakar pada alasan ideologis. Untuk menemukan motivasi ideologis tersebut penulis akan fokus pada pernyataan resmi para politisi sayap kanan Israel baik melalui transkrip pidato maupun

wawancara dengan media maupun bahan-bahan yang tersedia di koran-koran baik cetak maupun elektronik. Diskursus dominan di masyarakat dibentuk oleh siapa yang memegang kekuasaan ataupun memiliki otoritas dan menganalisa narasi yang dipergunakan merupakan cara untuk menginterpretasi mengapa kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Israel menyangkut kedua permasalahan tersebut. Oleh karena itu bab ini akan berupaya memahami diskursus Zionisme Revisionis dan kebijakan pemerintah sayap kanan mengenai status Yerusalem dan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Bab IV Kesimpulan. Penulis akan menyimpulkan temuan dari penelitian ini yang diharapkan dapat membantu memahami fenomena ini dan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka pemikiran dan data yang tersedia.